

Analysis Of The Budget Realization Report (BRR) To Assess The Efficiency And Effectiveness Of The Financial Performance Of The North Sumatra Provincial Government

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Leon Reynold Pakpahan¹ ; Puja Rizqy Ramadhan² ; Irawan³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹pakpahanleon@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [26 September 2026]

Accepted [30 September 2026]

KEYWORDS

*Budget Realization Report
(LRA); Effectiveness; Efficiency;
Financial Performance; Local
Government.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hingga akhirnya penelitian ini memberikan gambaran tentang peran LRA dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen (*documentary analysis*). Penelitian bersifat *desk research* karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik yang dipublikasikan secara daring. Sumber data penelitian meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah daerah, serta data pendukung yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus analisis data terletak pada laporan keuangan daerah dari tahun 2022 s/d 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *purposive sampling* dimana data yang terkumpul berasal dari kriteria variabel penelitian ini. Sumber data diperoleh dari portal ruang publik pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022–2024 mengalami penurunan, ditandai dengan efektivitas yang menurun dari sangat efektif menjadi cukup efektif serta efisiensi yang berubah dari kurang efisien menjadi tidak efisien. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terbukti efektif sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness and efficiency of the financial performance of the North Sumatra Provincial Government based on the Budget Realization Report (Laporan Realisasi Anggaran/LRA). Furthermore, the study provides an overview of the role of the Budget Realization Report in evaluating government financial performance. This research employed a descriptive qualitative method using a documentary analysis approach. It is classified as desk research because it relies on secondary data obtained from publicly available documents. The data sources included the Budget Realization Report (LRA), regional government financial statements, and supporting data collected from the official websites of the North Sumatra Provincial Government, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), and Statistics Indonesia (BPS). The analysis focused on regional financial reports covering the period from 2022 to 2024. Data were collected using purposive sampling, in which the selected documents met the criteria of the research variables. All data were obtained from the official public information portals of the North Sumatra Provincial Government. The findings indicate that the financial performance of the North Sumatra Provincial Government declined during the 2022–2024 period. This decline was reflected in a decrease in effectiveness from highly effective to moderately effective, while efficiency deteriorated from less efficient to inefficient. The Budget Realization Report (LRA) proved to be an effective instrument for evaluating financial performance and supporting improvements in regional financial management.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengalokasian sumber daya yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (Sartika et al., 2024). Dalam perspektif tersebut, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Halim, 2014).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan informasi mengenai target dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah dalam satu periode anggaran. LRA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD. Analisis terhadap LRA dilakukan melalui pengukuran berbagai indikator kinerja, seperti efektivitas pencapaian pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, penyerapan belanja, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Penggunaan analisis varians dalam sektor publik memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi sehingga kualitas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran dapat dievaluasi secara lebih objektif (Lee et al., 2021; Schick, 2003).

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara target dan realisasi anggaran (Syahputra & Rahmat, 2021). Dalam konteks sektor publik, efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjalankan program yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan (*doing the right things*) (Cohen, 1993). Sementara itu, efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga setiap pengeluaran menghasilkan manfaat yang maksimal. Pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya pada sektor-sektor produktif (Sri Endah Cicilia et al., 2015).

Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja pengelolaan anggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat anggaran yang tidak terserap secara optimal sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum selalu mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023, 2024; Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024).

Data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2022–2024 menunjukkan adanya kecenderungan ketidakseimbangan antara target pendapatan, realisasi PAD, dan belanja daerah. Pada tahun 2022 target PAD sebesar Rp7,26 triliun hampir seluruhnya tercapai dengan tingkat realisasi 99,96%, namun masih menghasilkan SiLPA sebesar Rp1,08 triliun. Pada tahun 2023 target PAD meningkat menjadi Rp8,91 triliun, tetapi realisasinya hanya mencapai 81,1%, sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp13,75 triliun. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024 ketika realisasi PAD hanya mencapai 82,7% dari target meskipun belanja daerah tetap berada pada tingkat yang tinggi. Bahkan pada tahun 2025 pemerintah kembali meningkatkan APBD dengan target PAD sebesar Rp9,24 triliun dan belanja daerah mencapai Rp15,03 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggaran belum diikuti oleh optimalisasi pendapatan daerah maupun peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh berbagai indikasi lemahnya kualitas perencanaan anggaran. Pergeseran APBD yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya perubahan prioritas program yang berpotensi menurunkan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, ketidakseimbangan antara peningkatan belanja daerah dan kemampuan pendapatan menyebabkan tekanan fiskal yang berdampak pada perlunya penyesuaian anggaran di berbagai sektor pembangunan (Pos, 2025). Menurut (Shah, 2005), inefisiensi sektor publik terjadi ketika sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Joseph E, 1986) yang menyatakan bahwa lemahnya perencanaan, alokasi sumber daya yang kurang tepat, serta minimnya evaluasi kinerja merupakan penyebab utama rendahnya efisiensi organisasi sektor publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada analisis rasio keuangan secara parsial. Penelitian (Cahyani et al., 2025; Utami et al., 2023) umumnya hanya mengevaluasi efektivitas PAD atau efisiensi belanja tanpa mengaitkan hasil analisis dengan fenomena pergeseran APBD, SiLPA, kualitas perencanaan anggaran, maupun keseimbangan fiskal daerah. Selain itu, hasil *systematic review*



(Haetami et al., 2026) menunjukkan bahwa penelitian mengenai efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan rasio keuangan konvensional dan belum banyak mengintegrasikan hubungan antara perencanaan anggaran, realisasi APBD, serta kualitas output pembangunan daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran periode 2022–2024. Analisis dilakukan melalui pengukuran rasio efektivitas yang membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta rasio efisiensi yang membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target anggaran, realisasi APBD, SiLPA, dan kondisi fiskal daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

LANDASAN TEORI

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena menjadi instrumen utama dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma administrasi publik modern, pengelolaan keuangan tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penciptaan nilai publik (*public value*) melalui penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Mardiasmo, 2021; World Bank, 2020). Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh (Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Konsep tersebut diperkuat oleh pendekatan *Value for Money* yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Mardiasmo, 2021). Pendekatan ini menempatkan pengelolaan anggaran bukan sekadar sebagai proses administrasi, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dan efisiensi menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. APBD disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), sehingga setiap alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan target kinerja yang akan dicapai (Mardiasmo, 2021). Melalui pendekatan tersebut, anggaran tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif.

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) selama satu periode anggaran. (Halim, 2017) menjelaskan bahwa LRA berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap tingkat pencapaian target anggaran sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran pada periode berikutnya. Sementara itu, (Mahmudi, 2016) menegaskan bahwa kualitas informasi dalam LRA sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan proses audit sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, LRA diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui analisis terhadap pencapaian target pendapatan, penggunaan belanja daerah, serta kondisi SiLPA selama periode penelitian.

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut (Mardiasmo, 2021), efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi melalui perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi tingkat realisasi pendapatan dibandingkan target yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya.

Di sisi lain, efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan keluaran yang maksimal. (Mahmudi, 2016) menjelaskan bahwa efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input dan output, di mana penggunaan sumber daya harus mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Efektivitas yang tinggi belum tentu mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik apabila penggunaan anggaran masih boros. Sebaliknya, efisiensi yang tinggi juga tidak akan memberikan manfaat apabila target pembangunan tidak tercapai. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi perlu dianalisis secara bersamaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. (Junaid & Serliyana, 2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan memiliki tingkat efisiensi yang baik meskipun tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan masih relatif rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran belum selalu diikuti oleh meningkatnya kapasitas fiskal daerah.

Penelitian (Mujiyani & Safitri, 2025) pada Pemerintah Provinsi Banten menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan tergolong baik, namun efisiensi belanja daerah masih belum optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam mencapai target pendapatan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran apabila penggunaan belanja masih kurang efisien.

Pada tingkat pemerintahan desa, (Marpaung & Irawan, 2025) menjelaskan bahwa analisis rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Sementara itu, (Zalukhu et al., 2020) menyoroti bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi pemerintah dipengaruhi oleh kapabilitas pengguna, dukungan manajemen, serta pendidikan dan pelatihan. Di sisi lain, (Rizqy Ramadhan, 2019) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis rasio keuangan secara parsial. Penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan hubungan antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi pendapatan, belanja daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta dinamika perubahan APBD dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian pada tingkat pemerintah provinsi, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran periode 2022–2024, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara lebih komprehensif melalui pendekatan Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi tingkat pencapaian target pendapatan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika perencanaan anggaran, perubahan APBD, dan kondisi SiLPA sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang bersumber dari dokumen keuangan pemerintah daerah, sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan data yang tersedia. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kinerja keuangan daerah merupakan realitas yang dapat diukur secara objektif melalui indikator-indikator kuantitatif yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah (Creswell et al., 2018).

Objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan periode pengamatan tahun anggaran 2022–2024. Penelitian bersifat *desk research* karena menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen publik yang dipublikasikan secara daring. Sumber data penelitian meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan keuangan pemerintah daerah, serta data pendukung yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan.

Penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dan target pendapatan. Sementara itu, efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target pendapatan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini tabel 1 dan 2 untuk kriteria hasil perhitungan masing-masing rasio

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016)

Kategori	Rasio Efektivitas	Kriteria/Interpretasi
Sangat Efektif	> 100%	Realisasi pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan.
Efektif	90% – 100%	Realisasi pendapatan hampir mencapai atau telah mencapai target yang ditetapkan.
Cukup Efektif	80% – 89%	Realisasi pendapatan cukup mendekati target yang telah ditetapkan.
Kurang Efektif	60% – 79%	Realisasi pendapatan masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Tidak Efektif	< 60%	Realisasi pendapatan sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efisien Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016)

Kategori	Rasio Efisiensi	Kriteria/ Interpretasi
Sangat Efisien	< 60%	Penggunaan anggaran sangat hemat dibandingkan dengan pendapatan.
Efisien	60% – 80%	Penggunaan anggaran cukup hemat dan terkendali.
Cukup Efisien	80% – 90%	Penggunaan anggaran relatif seimbang dengan pendapatan.
Kurang Efisien	90% – 100%	Penggunaan anggaran hampir sama dengan pendapatan.
Tidak Efisien	> 100%	Pengeluaran melebihi pendapatan.

Hasil perhitungan rasio kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas dan efisiensi keuangan daerah yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016). Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta menilai peran Laporan Realisasi Anggaran sebagai instrumen evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022–2024 disajikan pada tabel 3. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas pada tahun 2022 mencapai 101,08% sehingga termasuk kategori sangat efektif, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut didukung oleh tingginya realisasi pendapatan pajak daerah, pendapatan transfer, dan dana bagi hasil yang mampu mengompensasi beberapa komponen pendapatan yang belum mencapai target.

Tabel 3. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemprov Sumatera Utara (2022–2024)

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kategori
2022	12.459.352.172.672	12.594.412.688.861,51	101,08%	Sangat Efektif
2023	14.375.662.997.407	12.757.833.199.492,51	88,75%	Cukup Efektif
2024	14.769.604.957.852	13.236.899.906.825,35	89,62%	Cukup Efektif

Pada tahun 2023 rasio efektivitas menurun menjadi 88,75%, kemudian meningkat sedikit menjadi 89,62% pada tahun 2024. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2024, kedua tahun tersebut masih berada pada kategori cukup efektif, yang mengindikasikan bahwa target pendapatan belum dapat direalisasikan secara optimal. Penurunan efektivitas terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada komponen retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif stabil.

Secara keseluruhan, tren rasio efektivitas menunjukkan adanya penurunan kemampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai target pendapatan selama periode penelitian. Hasil ini mengindikasikan perlunya optimalisasi sumber-sumber PAD serta peningkatan akurasi dalam penyusunan target pendapatan agar efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode anggaran berikutnya.

Gambar 1. Tren Rasio Efektivitas



Analisis Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022–2024 disajikan pada tabel 4. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis, rasio efisiensi pada tahun 2022 sebesar 99,32%, sehingga termasuk kategori kurang efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja, sehingga ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas meskipun realisasi pendapatan masih lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja.

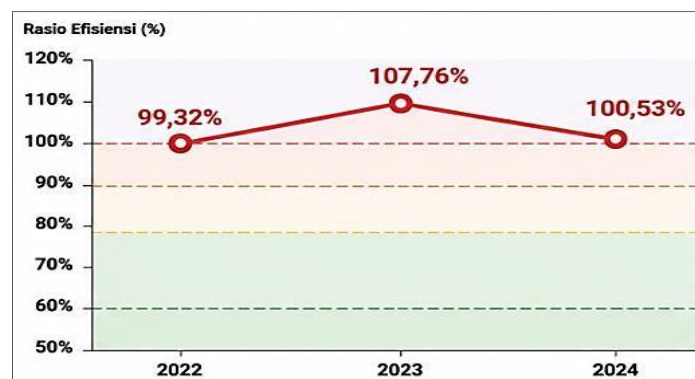
Tabel 4. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemprov Sumatera Utara (2022–2024)

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	12.594.412.688.861,51	12.509.062.821.349,16	99,32%	Kurang Efisien
2023	12.757.833.199.492,51	13.748.313.016.644,99	107,76%	Tidak Efisien
2024	13.236.899.906.825,35	13.306.890.170.297,10	100,53%	Tidak Efisien

Pada tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 107,76%, yang termasuk kategori tidak efisien, karena realisasi belanja telah melampaui realisasi pendapatan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya defisit anggaran dan mencerminkan bahwa pengendalian belanja belum mampu mengimbangi kemampuan penerimaan daerah, terutama akibat belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024 rasio efisiensi menurun menjadi 100,53%, namun masih berada pada kategori tidak efisien karena realisasi belanja tetap lebih tinggi daripada realisasi pendapatan. Meskipun demikian, penurunan rasio dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja yang diikuti dengan penurunan nilai defisit anggaran.

Secara keseluruhan, tren rasio efisiensi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2022–2024 belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Tingginya proporsi belanja operasi dan belanja transfer, serta belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya efisiensi pengelolaan APBD. Hasil tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pengendalian belanja, peningkatan kualitas belanja daerah, dan optimalisasi penerimaan daerah guna menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih berkelanjutan.

Gambar 2. Tren Rasio Efisiensi



Pembahasan

Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2022–2024 mengalami penurunan. Rasio efektivitas sebesar 101,08% pada tahun 2022 menunjukkan kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88,75% dan 89,62% yang termasuk kategori cukup efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target pendapatan, namun pencapaiannya belum konsisten selama periode penelitian.

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Penurunan rasio efektivitas pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pencapaian target pendapatan masih menghadapi kendala, terutama karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif stabil, ketergantungan terhadap sumber pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat melalui optimalisasi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh (Cohen, 1993), bahwa efektivitas diukur dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, tujuan tersebut tercermin pada kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan target pendapatan yang lebih realistis, penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi potensi sumber-sumber PAD.

Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menunjukkan kondisi yang optimal. Rasio efisiensi sebesar 99,32% pada tahun 2022 termasuk kategori kurang efisien, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 107,76% dan 100,53% sehingga termasuk kategori tidak efisien. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja cenderung sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan pendapatan daerah, bahkan pada tahun 2023 dan 2024 realisasi belanja telah melampaui realisasi pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran.

Menurut (Mardiasmo, 2021), efisiensi dalam sektor publik merupakan salah satu prinsip *value for money*, yaitu kemampuan pemerintah menghasilkan pelayanan publik dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Tingginya rasio efisiensi pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja, terutama belanja operasi dan belanja transfer, sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian belanja masih perlu diperkuat agar keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah dapat terjaga. Temuan ini juga sejalan dengan teori *Stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi tidak hanya dilakukan melalui penghematan belanja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas belanja, penerapan anggaran berbasis kinerja, serta pengalokasian anggaran pada program-program yang memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.

Peran Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengevaluasi Kinerja Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Melalui informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja, LRA mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target pendapatan sekaligus kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran.

Temuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan pemerintah yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta surplus atau defisit anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, LRA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang memungkinkan pemerintah daerah menilai tingkat pencapaian target anggaran, mengidentifikasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam LRA menjadi dasar yang objektif bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, dan pengambilan kebijakan fiskal yang lebih akuntabel serta berorientasi pada kinerja.

Analisis rasio efektivitas dan efisiensi yang bersumber dari LRA menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan selama periode penelitian, yaitu dari kondisi boros (efektif tetapi kurang efisien) pada tahun 2022 menjadi kondisi payah (cukup efektif tetapi tidak efisien) pada tahun 2023 dan 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dinilai hanya dari pencapaian target pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mengendalikan belanja secara proporsional. Berikut acuan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi dengan menggunakan analisis komprehensif (matriks) (Cohen, 1993; Lee et al., 2021; Mahmudi, 2016; Majid, 2019)

Gambar 3. Analisis Komprehensif (Matriks)

ANALISIS KOMPREHENSIF (MATRIKS)									
Kombinasi Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022–2024									
RASIO EFEKTIVITAS (Pencapaian Target Pendapatan)		RASIO EFISIENSI (Penggunaan Belanja terhadap Pendapatan)							
EFEKTIF (≥ 100%) Pendapatan mencapai/ melampaui target	EFISIEN ($< 90\%$) Penggunaan belanja lebih hemat dari pendapatan		KURANG EFISIEN ($90\% - 100\%$) Penggunaan belanja hampir sama dengan pendapatan		TIDAK EFISIEN ($> 100\%$) Pengeluaran melebihi pendapatan				
	 KONDISI IDEAL (Efektif & Efisien) Pendapatan mencapai/melampaui target dan penggunaan belanja jauh lebih hemat daripada pendapatan yang diperoleh. Pengelolaan keuangan daerah sangat baik.	 KONDISI BOROS (Efektif & Tidak Efisien) Target pendapatan tercapai dengan baik, namun biaya operasional/belanja membengkak dan hampir menyamai pendapatan. Perlu pengendalian belanja agar tidak boros.	 KONDISI BOROS EKSTREM (Efektif & Tidak Efisien) Target pendapatan tercapai, tetapi belanja melebihi pendapatan. Menunjukkan pemborosan dan berpotensi menimbulkan defisit anggaran.						
CUKUP EFEKTIF ($80\% - 99\%$) Pendapatan belum mencapai target	 KONDISI CUKUP BAIK (Cukup Efektif & Efisien) Pendapatan belum mencapai target, namun belanja digunakan secara hemat. Perlu peningkatan pendapatan agar kinerja semakin optimal.	 KONDISI KURANG OPTIMAL (Cukup Efektif & Kurang Efisien) Pendapatan belum mencapai target dan belanja hampir sama dengan pendapatan. Perlu peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja.	 KONDISI SANGAT PAYAH (Tidak Efektif & Tidak Efisien) Pendapatan jauh di bawah target dan belanja melebihi pendapatan. Risiko defisit meningkat, perlu pengendalian belanja dan peningkatan pendapatan.						
	 KONDISI TIDAK OPTIMAL (Tidak Efektif & Efisien) Pendapatan jauh di bawah target, namun belanja digunakan hemat. Perlu strategi besar peningkatan pendapatan secara signifikan.	 KONDISI PAYAH (Tidak Efektif & Kurang Efisien) Pendapatan jauh di bawah target dan belanja hampir sama dengan pendapatan. Kinerja keuangan daerah rendah, perlu perbaikan menyeluruh.	 KONDISI SANGAT PAYAH (Tidak Efektif & Tidak Efisien) Pendapatan jauh di bawah target dan belanja melebihi pendapatan. Kondisi paling buruk, berpotensi defisit besar dan mengganggu keberlanjutan program.						
HASIL POSISI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022–2024									
TAHUN	RASIO EFEKTIVITAS (Pencapaian Target Pendapatan)			RASIO EFISIENSI (Penggunaan Belanja terhadap Pendapatan)			HASIL ANALISIS KOMPREHENSIF (Posisi Matriks)		
	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio	Kategori	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio	Kategori	 KONDISI BOROS (Efektif & Tidak Efisien)	 KONDISI PAYAH (Tidak Efektif & Tidak Efisien)	 KONDISI PAYAH (Tidak Efektif & Tidak Efisien)
2022	12.594.412.688.861,51	101,08%	Sangat Efektif	12.509.062.821.349,16	99,32%	Kurang Efisien			
2023	12.757.833.199.492,51	88,75%	Cukup Efektif	13.748.313.016.644,99	107,76%	Tidak Efisien			
2024	13.236.899.906.825,35	89,62%	Cukup Efektif	13.306.890.170.297,10	100,53%	Tidak Efisien			
Keterangan Kategori Efektivitas:  Sangat Efektif (≥100%)  Cukup Efektif (80% – 99%)  Tidak Efektif (<80%) Keterangan Kategori Efisiensi:  Efisien (<90%)  Kurang Efisien (90% – 100%)  Tidak Efisien (>100%)									

Keterangan Kategori Efektivitas: ● Sangat Efektif ($\geq 100\%$) ● Cukup Efektif ($80\% - 99\%$) ● Tidak Efektif ($< 80\%$) Keterangan Kategori Efisiensi: ● Efisien ($< 90\%$) ● Kurang Efisien ($90\% - 100\%$) ● Tidak Efisien ($> 100\%$)

Dengan demikian, Laporan Realisasi Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tetapi juga sebagai dasar evaluasi, pengendalian, dan perumusan kebijakan fiskal. Penggunaan analisis rasio efektivitas dan efisiensi secara terpadu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan anggaran, dan kinerja keuangan pada periode berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022–2024 mengalami penurunan. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan menurun dari kategori sangat efektif pada tahun 2022 menjadi cukup efektif pada tahun 2023–2024, sedangkan tingkat efisiensi berubah dari kurang efisien menjadi tidak efisien, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja belum diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terbukti berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Penggunaan kedua rasio secara terpadu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian belanja, dan perumusan kebijakan fiskal yang lebih akuntabel serta berorientasi pada kinerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disarankan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi perencanaan anggaran, penguatan pengendalian belanja, serta peningkatan kemampuan dalam merealisasikan target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hendaknya dilakukan secara berkala sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau membandingkan kinerja keuangan beberapa pemerintah daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengombinasikan analisis rasio keuangan dengan indikator kinerja lainnya, seperti rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja, maupun pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Terakhir, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji hubungan antara efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dengan capaian pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga mampu memberikan gambaran mengenai dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Lhp Lkpd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ihpd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Data 2023)*.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022–2023*.
- Cahyani, D. D., Amalia, G. S., Putri, J. A., & Zahira, A. A. (2025). Analisis Pengukuran Kinerja Efisien Dan Efektivitas Anggaranbelanja Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Periode 2020-2023. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 61–71.
<https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/513>
- Cohen, A. (1993). Defining And In Measuring Public Effectiveness Management. *Public Productivity & Management Review*, 17(1), 45–57. <https://doi.org/10.2307/3381048>
- Creswell, John W., Plano Clark, & Vicki L. (2018). Designing And Conducting Mixed Methods Research (3rd Ed.). In *How Media Inform Democracy: A Comparative Approach*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49–64.

- Haetami, A., Firmansyah, B., Itsniawan, A. M., & Irianto, B. R. (2026). Assessing The Effectiveness And Efficiency Of Local Government Budget Implementation In Indonesia : A Systematic Review Of Value For Money Performance (2016 – 2023). *Journal Of Economics And Social Sciences (Jess)*, 5, 211–
218. <https://doi.org/https://doi.org/10.59525/Jess.1418>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Apbn/Apbd)*. Jakarta : Salemba Empat. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detail/jkpkbpkpp-E-202111122805>
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Joseph E, S. (1986). *Economics Of The Public Sector*. New York : W.W. Norton. <https://archive.org/details/economicsofpubli0000stig>
- Junaid, M. T., & Serliyana. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 20(1), 42–50. <https://doi.org/10.30872/Jinv.V20i1.1687>
- Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2021). *Public Budgeting Systems* (10th Editi). Usa : Jones & Bartlett Learning. <https://studentebookhub.com/Wp-Content/Uploads/2024/Preview/9781284198980.Pdf>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (I, Issue 25). Sulawesi Selatan : Cv. Berkah Utami. http://www.academia.edu/download/54793453/Akuntansi_Sektor_Publik_Dana_Umum_GenEra.Docx
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi. https://books.google.co.id/books/about/Akuntansi_Sektor_Publik_Edisi_Terbaru.html?hl=id&id=Pbvceaaqbj&redir_esc=y
- Marpaung, E. H., & Irawan. (2025). *Economics And Digital Business Review Analisis Laporan Keuangan Desa Sei Sakat Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara*. 6(1), 652–664.
- Mujiyani, M., & Safitri, P. N. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Realisasi Apbd Provinsi Banten Periode 2017-2023. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 5(02), 12–17. <https://doi.org/10.56127/Jaman.V5i02.2217>
- Pos, S. (2025). Laporan Pergeseran Apbd Sumut 6 Kali Diselidiki Ditkrimsus Polda Sumut, Riki Irawan Sh Mh: Para Pihak Harus Dipanggil. *Sumut Pos*. <https://sumutpost.id/Laporan-Pergeseran-Apbd-Sumut-6-Kali-Diselidiki-Ditkrimsus-Polda-Sumut-Riki-Irawan-Sh-Mh-Para-Pihak-Harus-Dipanggil/>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.2455>
- Sartika, D., Ridwan, R., Gainau, P. C., Setyowati, W., Arshandy, E., Sari, R. P., Hantono, Hermelinda, T., Sopanah, A., Aprianti, S., Dwitayanti, Y., Andhayani, A., Rusdianti, I. S., Afriansyah, B., Sinaga, I., & Anshori, S. (2024). *Akuntansi Sektor Publik* (B. Arianto (Ed.); Vol. 2). Jawa Tengah : Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/569179-Akuntansi-Sektor-Publik-64020775.pdf>
- Schick, A. (2003). THE PERFORMING STATE REFLECTION ON AN IDEA WHOSE TIME HAS COMEBUT WHOSE IMPLEMENTATION HAS NOT. *OECD Journal on Budgeting.*, 1(December), 105– 112. file:///D:/Referensi_Penelitian/The-Performing-State-Reflection-on-an-Idea-Whose-Time-Has-Come-but-Whose-Implementation-Has-Not.pdf
- Shah, A. (2005). Public Expenditure. In *The Journal of Finance* (Vol. 27, Issue 4). Washinton, D.C : The World Bank. <https://doi.org/10.2307/2978708>
- Sri Endah Cicilia, V., Murni, S., & Engka, D. (2015). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.10245.17.2.2015>
- Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Jafa: Journal Of Accounting, Finance And And Auditing*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v3i1.890>
- Utami, W. B., Ramadhan, R., & Azzahroh, S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper ...*, 6(1), 86–95.
- World Bank. (2020). 2020 Global Report on Public Financial Management. In *Global Report on Public Finance*. <https://www.pefa.org/global-report-2020>

Zalukhu, R. S., Hutaaruk, R. P. S., Ramadhan, P. R., & Viranda, J. D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Nias Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*.